

MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS ISU-ISU KONTROVERSIAL MEDIA MASSA UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP DEMOKRATIS DAN PARTISIPASI BELAJAR SISWA DI SMK NEGERI 9 SURAKARTA TAHUN 2016

Ahmad Muhibbin
ahmad.muhibbin@ums.ac.id
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Margiyono
SMK negeri 9 Surakarta

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) bagaimana pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan sikap demokratis dan partisipasi belajar yang sekarang ini dilaksanakan; 2) bagaimana desain model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis isu-isu kontroversial di media massa untuk pengembangan sikap demokratis dan partisipasi belajar siswa; 3) seberapa besar model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis isu-isu kontroversial di media massa dapat mengembangkan sikap demokratis dan partisipasi belajar siswa.

Penelitian ini bersifat *research and development*. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengecekan kredibilitas data dilakukan dengan teknik triangulasi, *member check*, dan diskusi teman sejawat melalui FGD. Analisis data menggunakan model interaktif.

Hasil penelitian antara lain: 1) Pembelajaran PKn yang berlangsung selama ini belum dapat mengembangkan sikap demokratis dan partisipasi belajar siswa dengan baik; 2) Desain model Pembelajaran PKn berbasis isu-isu kontroversial media massa dengan mengkolaborasi strategi pembelajaran aktif; 3) besaran prosentase pengembangan sikap demokratis dan partisipasi dalam pembelajaran PKn, yakni: Hasil rata-rata uji coba ke 1 sampai ke 6 menunjukkan kemampuan menyampaikan pendapat secara kritis dan rasional (71,8%), kemampuan menanggapi permasalahan secara arif (73,6%), menyanggah secara santun dan bersahabat (74,6%). Tingkat partisipasi dalam pembelajaran sudah baik ditandai dengan kemampuan siswa dalam partisipasi secara cerdas (78,8%), partisipasi secara bertanggung jawab (81,3%), dan partisipasi secara saling menghargai (84,5%).

Kata kunci: *model pembelajaran, isu kontroversial, media massa, sikap demokratis, partisipasi belajar.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Oleh karena itu pembelajaran PKn perlu dilakukan berbagai inovasi untuk menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Budimansyah, 2008: 24). Berdasarkan kompetensi yang perlu dikembangkan maka terdapat tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions*.

Karakter kewarganegaraan merupakan sikap dan kebiasaan berpikir warganegara yang menopang berkembangnya fungsi sosial secara sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. *Civic disposition* adalah "...those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system". Secara konseptual *civic disposition* meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni "*Civility (respect and civil discourse), individual responsibility, self-discipline, civic-mindedness, open-mindedness (openness, skepticism, recognition of ambiguity), compromise (conflict of principles, compassion, generosity, and loyalty to the nation and its principles*" (Quigley, Buchanan, dan Bahmueller, 1991: 13-14).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

(PIPS) berpusat pada masalah (issue-centered education) dan berada dalam kerangka filsafat rekonstruksionisme. Carole L. Hahn (Shaver, 1991: 470) menyatakan “Social Studies educators have long asserted that studying and discussing issues is important to democracy”. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan membelajarkan siswa untuk mampu memecahkan masalah-masalah sosial, dan isu-isu kontroversial kebijakan publik, berada pada tradisi reflektif inquiry.

Tradisi “Social Studies Taught as Reflective Inquiry” merupakan pembelajaran yang menekankan pengembangan warganegara yang baik dengan kriteria kemampuannya “...to engage in a continual process of clarifying process of clarifying their own value structure” (Barr dkk, 1978: 27). Tujuan utama dari tradisi ini adalah “...the enhancement of the students’ decision making abilities, for decision making is the most important requirement the students’ decision making abilities, for decision making is the most important requirement of citizenship in a political democracy” (Barr dkk, 1978: 111). Dengan kata lain tradisi ini memusatkan perhatian pada pengembangan karakter warganegara yang baik dengan ciri pokoknya mampu mengambil keputusan dalam konteks sosial-politik.

Penelitian ini mengangkat permasalahan: 1) Bagaimana pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan sikap demokratis dan partisipasi belajar yang sekarang ini dilaksanakan; 2) Bagaimana desain model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis isu-isu kontroversial di media massa untuk peningkatan sikap demokrasi dan partisipasi belajar siswa; 3) Seberapa besar model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis isu-isu kontroversial di media massa dapat mengembangkan sikap demokratis dan partisipasi belajar siswa.

KAJIAN TEORI

1. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

PKn merupakan mata pelajaran yang bersifat *multifaset* sebagai integrasi dari disiplin ilmu politik, hukum,

pendidikan, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya yang dapat mendukung pembentukan warga negara yang baik. Namun secara filsafat keilmuan ia memiliki *ontology* pokok ilmu politik khususnya konsep “*political democracy*” untuk aspek “*duties and rights of citizen*” (Chreshore:1886). Secara epistemologis, PKn sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan dari salah satu dari lima tradisi “*social studies*” yakni “*citizenship transmission*” (Barr, Barr, dan Shermis:1978). Dikemukakan pula oleh Winataputra (2001) bahwa saat ini tradisi itu sudah berkembang pesat menjadi suatu “*body of knowledge*” yang dikenal dan memiliki paradigma sistemik yang di dalamnya terdapat tiga domain “*citizenship education*” yakni: domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural”.

Ketiga domain itu satu sama lain memiliki saling keterkaitan struktural dan fungsional yang diikat oleh konsepsi “*civic virtue and culture*” yang mencakup “*civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic commitment, dan civic competence*” (CCE:1998). Oleh karena itu, ontologi PKn saat ini sudah lebih luas dari pada embrionya sehingga kajian keilmuan PKn, program kurikuler PKn, dan aktivitas *socio-cultural* PKn saat ini benar-benar bersifat multifaset/multidimensional. Sifat multi dimensionalitas inilah yang membuat mata pelajaran PKn dapat disikapi sebagai: pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum, hak azasi manusia, dan pendidikan demokrasi.

Zamroni dalam Tim ICCE UIN Jakarta (2001:7) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Depdiknas (2003:2) menyatakan bahwa Kewarganegaraan (Citizenship) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri

yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan PKn (*civic education*) adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warganegara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global, maka partisipasi semacam itu memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan. Menurut Budimansyah (2008: 24-25), Dari sejumlah kompetensi yang diperlukan, yang terpenting adalah (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3) pengembangan karakter dan sikap mental tertentu; dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional. Berdasarkan kompetensi yang perlu dikembangkan, terdapat tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions*.

2. Demokrasi dan partisipasi

Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tidak dapat dikatakan demokrasi jika tidak ada partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal: *pertama*, pemerintahan dari rakyat (*government of the people*); *kedua*, pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*); *ketiga*, pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*). Jadi hakikat suatu pemerintah yang demokratis bila ketiga hal di atas dapat dijalankan dan ditegakkan dalam tata pemerintahan dengan partisipasi rakyat yang tinggi.

Istilah demokrasi pertama kali dipakai di Yunani Kuno, khususnya di Kota Athena. Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu merupakan kota kecil, penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk

bermusyawarah. Dalam rapat itu diambil keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijaksanaan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan mengenai kemasyarakatan (Herdiawanto dan Hamdayama, 2010: 81). Ada sesuatu yang penting dengan demokrasi pada abad itu, yaitu lahirnya dokumen Magna Charta (piagam besar) yaitu suatu piagam yang berisikan perjanjian antara beberapa bangsawan dan Raja Jhon di Inggris bahwa raja mengakui beberapa hak dan *privileges* bawahannya sebagai imbalan untuk menyerahkan dana dari keperluan perang dan lain-lain. (Budiardjo, 2008: 108-112).

Munculnya kembali prinsip demokrasi di Eropa Barat sangat didorong oleh terjadinya perubahan sosial dan kultural yang berintikan pendekatan pada kemerdekaan akal dari berbagai pembatasan. Dua kejadian besar yakni "Renaissance" dan "Reformasi" telah menandai dua perubahan besar tersebut (Eko, 2011). Sekarang istilah demokrasi nyaris menyerupai puing-puing peninggalan kuno yang digunakan secara terus-menerus selama 2.500 tahun (Dahl, 1982: 9).

Tidak semua warga negara dapat langsung terlibat dalam perwakilan. Hanya mereka yang karena sebab tertentu, seperti kemampuan membangun pengaruh dan menguasai suara politik yang terpilih sebagai wakil. Sementara sebagian besar rakyat hanya dapat puas jika kepentingannya terwakili. Mereka tak memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk mengefektifkan hak-hak mereka sebagai warga negara (Sumarsono, dkk. 2002: 20).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat *research and development* yang dilakukan secara bertahap dalam waktu dua semester. Tahap pertama dilakukan pada semester gasal dan tahap kedua dilakukan pada semester genap tahun 2015/2016. Penelitian tahap pertama merupakan landasan bagi pengembangan tahap selanjutnya atau tahap kedua. Dengan demikian rangkaian metode selama dua

semester ini merupakan satu kesatuan integral dalam memecahkan masalah pokok yang diteliti. Menurut Sugiyono (2008:298), langkah-langkah dalam penelitian *Research and Development* (R&D) yaitu mengkaji potensi masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi masal.

Penelitian ini diawali dari identifikasi masalah dan perumusan permasalahan yang dialami oleh siswa dengan melakukan dialog bersama guru Pendidikan Kewarganegaraan yang menjadi subjek dalam penelitian, untuk meningkatkan sikap demokratis dan partisipasi belajar siswa. Untuk memecahkan masalah tersebut ditawarkan Model Pembelajaran PKn berbasis isu-isu kontroversial media masa. Uji Coba model dilaksanakan oleh peneliti dan guru sebagai mitra kolaborasi berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Ujicoba dilakukan 6 kali dengan mengkolaborasikan strategi pembelajaran aktif yang berbeda, antara lain: *Everyone is a Teacher Here; Make a Math; Answer Gallery; Active Debate; Point-Counterpoint; Physical Self-Assesment*. Perencanaan pembelajaran ini bersifat fleksibel, artinya selalu dapat dikondisikan atau berubah sesuai dengan kebutuhan pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Peneliti sebagai *instrument* kunci dengan alasan bahwa secara langsung dapat menyesuaikan diri untuk merespon interaksi yang terjadi pada diri subjek, sehingga peneliti dapat mempertahankan keutuhan, mengembangkan dasar pengetahuan, memproses informasi dengan segera, dan dapat memanfaatkan untuk menyelidiki respon yang istimewa atau khas, seperti yang disampaikan oleh Guba dan Lincoln (1981). Kehadiran peneliti sebagai alat utama terkadang dihadapkan pada permasalahan psikologis. Oleh karena itu, peneliti perlu memperhatikan prinsip-prinsip etik penelitian.

Sumber data penelitian adalah guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, siswa SMK negeri 9 Surakarta. Pemilihan *informan* dilakukan secara

purposive yaitu berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama, oleh karena itu uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan cara pengecekan kredibilitas dan pengauditan data (Lincoln & Guba, 1981). Dalam penelitian kualitatif, kriteria keabsahan data dilakukan dengan mengecek/menguji empat kriteria, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Ulfatin, 2013:270).

Analisis data menggunakan analisis model interaktif meliputi tahapan: 1) pengumpulan data; 2) reduksi data; 3) sajian data; dan 4) verifikasi. Analisis dilakukan terus menerus dari awal pengumpulan data sampai dengan betul-betul diperolehnya data hasil penelitian yang lengkap. Proses analisis terjadi secara interaktif, yang menguji antar komponen secara siklus yang berlangsung dalam waktu cukup lama, sehingga diperoleh hasil penjelasan yang benar-benar tuntas dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembelajaran PKn yang berjalan selama ini

Responden dari guru menyampaikan bahwa proses pembelajaran PKn di SMK negeri 9 Surakarta selama ini masih bersifat konvensional yang mengandalkan ceramah, meskipun mereka juga mengetahui berbagai kelemahan pembelajaran konvensional tersebut. Proses pembelajaran konvensional mendasarkan diri pada paradigma instruktivisme yang berpusat pada guru, sehingga populer dengan sebutan kegiatan belajar mengajar (guru mengajar, siswa belajar). Oleh karena itu belum berhasil mengembangkan sikap demokratis dan partisipasi belajar siswa secara maksimal.

Selanjutnya responden lain menyampaikan bahwa proses pembelajaran selama ini lebih bersifat *one way traffic communication*, yaitu guru sebagai penyampai materi saja dan sebagai satu-satunya sumber dalam pembelajaran. Sementara itu siswa yang diwawancarai merasa dijadikan sebagai objek yang harus menerima seluruh materi dan cenderung

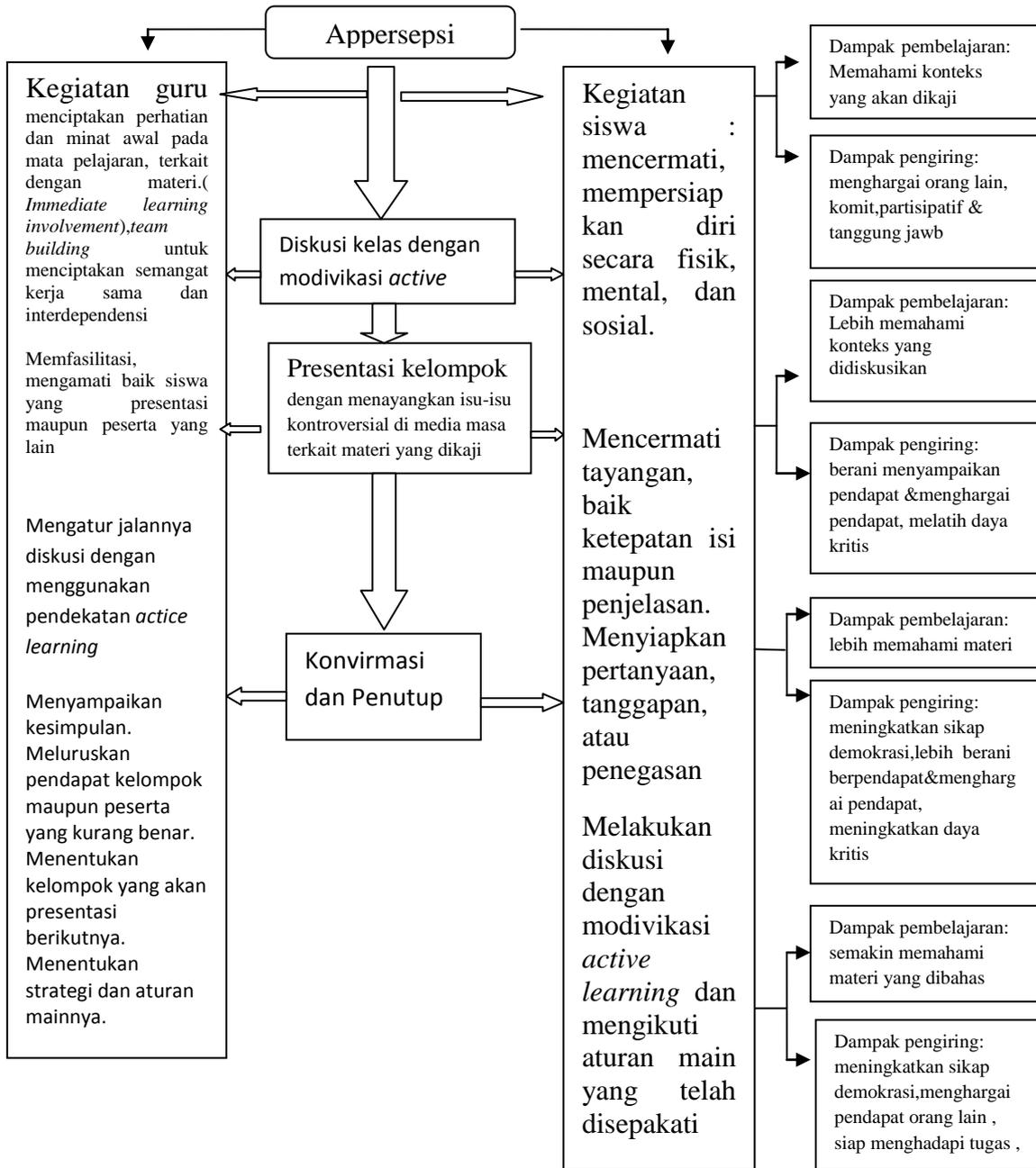
pasif karena kurang diselingi dengan strategi pembelajaran yang beragam. Dalam kegiatan belajar mengajar semacam ini, guru sebagai penyampai materi, satu-satunya sumber dan mengukur tingkat kemampuan siswa hanya dari aspek kognisinya saja, tanpa perlu mengetahui secara holistik tingkat kemampuan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Responden dari siswa juga menyatakan bahwa mereka merasa lebih sering mendapat materi Pendidikan Kewarganegaraan dengan sasaran atau target pada aspek kognitif sehingga cenderung menjadi verbalis sementara guru hanya berorientasi pada target (mengejar target materi). Pada umumnya pembelajaran konvensional menggunakan dengan ceramah yang terkadang mengandalkan tayangan *powerpoint* yang menjenuhkan.

Hasil pembahasan dalam *Focus Group Discussion* dinyatakan bahwa apabila guru hanya sekedar mengandalkan penggunaan ceramah dalam proses pembelajaran tentu tidak akan dapat mencapai tujuan yang ideal, terutama dalam meningkatkan daya kritis siswa, sikap demokrasi dan partisipasi belajar siswa. Ceramah tidak bisa diandalkan sebagai metode utama dalam proses pembelajaran karena ada beberapa kelemahannya: (a) Perhatian siswa tidak stabil dan cenderung menurun setiap menit dalam proses pembelajaran. (b) Pembelajaran dengan metode ceramah tidak tahan terhadap berbagai macam gangguan, misalnya gangguan suara yang bising, bahkan suara sepatu orang yang lewat di samping kelasnya. (c) Pembelajaran dengan metode ceramah hanya sesuai untuk "*auditory learners*" dan mengkesampingkan yang lain

(d) Pembelajaran dengan metode ceramah cenderung untuk pengajaran tingkat kognisi rendah, tidak dapat meningkat pada level analisis dan evaluatif; (e) Ceramah cenderung memperlakukan semua mahasiswa memerlukan informasi dalam tempo yang sama; (f) Ceramah tidak dapat meningkatkan daya kritis siswa (g) Ceramah tidak mendukung peningkatan sikap demokrasi dan partisipasi belajar siswa; (h) Siswa pada umumnya kurang menyenangi karena monoton.

2. Desain model pembelajaran PKn berbasis isu-isu kontroversial di media massa

Berdasarkan hasil uji coba dan hasil FGD menyimpulkan bahwa Desain model pembelajaran PKn berbasis isu-isu kontroversial di media massa dan dampak pembelajarannya dapat dilihat pada bagan berikut.



Dalam FGD dinyatakan bahwa mengajar adalah membuat siswa memiliki kesempatan untuk aktif belajar, siswa dan materi yang dipelajari merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Proses pembelajaran berpusat pada aktivitas siswa. Dalam konteks ini paradigma yang digunakan konstruktivisme bukan instruktivisme. Oleh karena itu, terminologi yang dipakai adalah "Pembelajaran" bukan

"Pengajaran" dengan model-model penyelesaian masalah yang menuntut partisipasi aktif siswa, bukan sekedar penyampaian satu arah, dan penekanannya pada transfer nilai-nilai (*know how*) bukan sekedar transfer pengetahuan (*know what*). Desain pembelajaran PKn berbasis isu-isu kontroversial di media massa untuk mengembangkan sikap demokratis dan partisipasi belajar siswa perlu dirancang

dan diuji coba berkali-kali sehingga menjadi model pembelajaran PKn yang dapat dijadikan rujukan.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) yang berpusat pada masalah (*issue-centered education*) dan berada dalam kerangka filsafat rekonstruksionisme. Carole L. Hahn (Shaver, 1991: 470) menyatakan “*Social Studies educators have long asserted that studying and discussing issues is important to democracy*”. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan membelajarkan siswa untuk mampu memecahkan masalah-masalah sosial, dan isu-isu kontroversial kebijakan publik, berada pada *tradisi reflektif inquiry*. *Tradisi “Social Studies Taught as Reflective Inquiry”* merupakan pembelajaran yang menekankan pengembangan warganegara yang baik dengan kriteria yaitu dilihat dari kemampuannya “*...to engage in a continual process of clarifying process of clarifying their own value structure*” (Barr dkk, 1978: 27). tujuan utama dari tradisi ini adalah “*...the enhancement of the students’ decision making abilities, for decision making is the most important requirement the students’ decision making abilities, for decision making is the most important requirement of citizenship in a political democracy*” (Barr dkk, 1978: 111). Dengan kata lain tradisi ini memusatkan perhatian pada pengembangan karakter warganegara yang baik dengan ciri

- pokoknya mampu mengambil keputusan.dalam konteks sosial-politik.
3. Pengembangan sikap demokratis dan partisipasi belajar siswa

Sikap demokratis yang dikembangkan melalui model pembelajaran PKn berbasis isu-isu kontroversial media massa di SMK Negeri 9 Surakarta antara lain sikap demokratis yang ditandai dengan: a. Menyampaikan pendapat secara kritis dan rasional; b. menanggapi permasalahan secara arif; c. menyanggah secara santun dan bersahabat. Sedangkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran yang dikembangkan adalah: a. partisipasi secara cerdas; b. partisipasi secara bertanggung jawab; c. partisipasi dengan saling menghargai.

Model pembelajaran PKn berbasis isu-isu kontroversial media massa yang diujicobakan selama dua semester dilakukan 6 kali uji coba dengan mengkolaborasikan strategi pembelajaran aktif. Uji coba ke 1 kolaborasi dengan strategi Everyone is a Teacher Here, ujicoba ke 2 kolaborasi dengan strategi Make a Match. ujicoba ke 3 kolaborasi dengan strategi Answer Gallery, ujicoba ke 4 kolaborasi dengan strategi Active debate, ujicoba ke 5 kolaborasi dengan strategi Point- counter point, ujicoba ke 6 kolaborasi dengan strategi Physical self assesment.

Hasil uji coba model pembelajaran PKn berbasis isu-isu kontroversial media massa dalam mengembangkan sikap demokrasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Unsur yang diteliti	Hasil ujicoba 1			Hasil ujicoba 2			Hasil ujicoba 3			Hasil ujicoba 4			Hasil ujicoba 5			Hasil ujicoba 6		
	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
Sikap demokratis (%)	64	67	65	70	75	72	73	77	75	71	65	76	75	76	75	78	82	85
Partisipasi (%)	70	75	76	75	78	85	76	78	86	84	85	83	83	85	88	85	87	89

Keterangan:

1. Hasil ujicoba ke 1 kolaborasi dengan strategi *Everyone is a Teacher Here* menunjukkan adanya pengembangan sikap demokrasi siswa sudah cukup baik ditandai adanya kemampuan menyampaikan pendapat secara kritis dan rasional (64% siswa), kemampuan menanggapi permasalahan secara arif (67% siswa), menyanggah secara santun dan bersahabat (65%). Tingkat partisipasi dalam pembelajaran sudah baik ditandai dengan kemampuan siswa dalam partisipasi secara cerdas (70%), partisipasi secara bertanggung jawab (75%), dan partisipasi dengan saling menghargai (76%).
2. Hasil ujicoba ke 2 kolaborasi dengan strategi *Make a Match* menunjukkan adanya pengembangan sikap demokrasi siswa sudah cukup baik ditandai adanya kemampuan menyampaikan pendapat secara kritis dan rasional (70% siswa), kemampuan menanggapi permasalahan secara arif (75% siswa), menyanggah secara santun dan bersahabat (72%). Tingkat partisipasi dalam pembelajaran sudah baik ditandai dengan kemampuan siswa dalam partisipasi secara cerdas (75%), partisipasi secara bertanggung jawab (78%), dan partisipasi dengan saling menghargai (85%).
3. Hasil ujicoba ke 3 kolaborasi dengan strategi *Answer Gallery* menunjukkan adanya pengembangan sikap demokrasi siswa sudah cukup baik ditandai adanya kemampuan menyampaikan pendapat secara kritis dan rasional (73% siswa), kemampuan menanggapi permasalahan secara arif (77% siswa), menyanggah secara santun dan bersahabat (75%). Tingkat partisipasi dalam pembelajaran sudah baik ditandai dengan kemampuan siswa dalam partisipasi secara cerdas (76%), partisipasi secara bertanggung jawab (78%), dan partisipasi dengan saling menghargai (86%).
4. Hasil ujicoba ke 4 kolaborasi dengan strategi *Active debate* menunjukkan adanya pengembangan sikap demokrasi siswa sudah cukup baik ditandai adanya kemampuan menyampaikan pendapat secara kritis dan rasional (71% siswa), kemampuan menanggapi permasalahan secara arif (65% siswa), menyanggah secara santun dan bersahabat (76%). Tingkat partisipasi dalam pembelajaran sudah baik ditandai dengan kemampuan siswa dalam partisipasi secara cerdas (84%), partisipasi secara bertanggung jawab (85%), dan partisipasi dengan saling menghargai (83%).
5. Hasil ujicoba ke 5 kolaborasi dengan strategi *Point-counter point* menunjukkan adanya pengembangan sikap demokrasi siswa sudah cukup baik ditandai adanya kemampuan menyampaikan pendapat secara kritis dan rasional (75% siswa), kemampuan menanggapi permasalahan secara arif (76% siswa), menyanggah secara santun dan bersahabat (75%). Tingkat partisipasi dalam pembelajaran sudah baik ditandai dengan kemampuan siswa dalam partisipasi secara cerdas (83%), partisipasi secara bertanggung jawab (85%), dan partisipasi dengan saling menghargai (88%).
6. Hasil ujicoba ke 6 kolaborasi dengan strategi *Physical self assesment* menunjukkan adanya pengembangan sikap demokrasi siswa sudah cukup baik ditandai adanya kemampuan menyampaikan pendapat secara kritis dan rasional (78% siswa), kemampuan menanggapi permasalahan secara arif (82% siswa), menyanggah secara santun dan bersahabat (85%). Tingkat partisipasi dalam pembelajaran sudah baik ditandai dengan kemampuan siswa dalam partisipasi secara cerdas (85%), partisipasi secara bertanggung jawab (87%), dan partisipasi dengan saling menghargai (89%).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Peter Toth yang berjudul *“Learning Strategies and Styles in Vocational Education”* menyatakan bahwa *“In comparing learning theory and learning model (teaching theory, teaching model), Learning Strategies and Styles in Vocational Education”* menyatakan bahwa *“learning is to be interpreted in the former as a behavioral, cognitive, social, etc. change resulting from a particular situation,”* dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara teori belajar dan model pembelajaran yang digunakan guru.

Model pembelajaran ini merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih maksimal dan berimplikasi dampak pengiring. Kolaborasi yang dilakukan antara Peneliti dan guru PKn SMK Negeri 9 ini mendukung teori yang dikemukakan Smith dan Mc Gregor dalam artikelnya yang berjudul *“What is Collaborative Learning”* menyatakan bahwa *“Collaborative learning” is an umbrella term for a variety of educational approaches involving joint intellectual effort by students, or students and teachers together. Usually, students are working in groups of two or more, mutually searching for understanding, solutions, or meanings, or creating a product.* Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa Pembelajaran kolaboratif merupakan istilah umum untuk berbagai pendekatan pendidikan yang melibatkan upaya intelektual antar siswa, atau siswa dengan gurunya. Biasanya, siswa bekerja dalam kelompok dua atau lebih, saling mencari pemahaman, solusi, atau makna, atau menciptakan produk.

Model pembelajaran ini dapat mengembangkan potensi yang dimiliki siswa sehingga mampu berperilaku baik. Siswa setelah belajar PKn dalam mengungkapkan pendapat atau bertanya terhadap materi yang belum jelas sudah berani, rajin mengerjakan tugas yang diberikan guru, saat bertemu guru

menyapa dengan senyum dan selalu merindukan guru hadir dikelas. Beberapa hal tersebut sesuai dengan Jakni (2014:3) yang menyatakan bahwa tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu untuk memberikan kompetensi: a. berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; b. berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan, dan bernegara; c. berkembang secara positif dan berdemokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain; d. berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi.

KESIMPULAN

1. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah sangat strategis dalam meningkatkan sikap demokrasi dan partisipasi belajar siswa. Namun realita di lapangan pelaksanaan pembelajaran PKn belum ideal dalam mengembangkan sikap demokrasi dan partisipasi belajar siswa. Perlu ada dinamika paradigmatik pembelajaran PKn di sekolah dan unsur-unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi dan partisipasi belajar siswa.
2. Model pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan berbasis isu-isu kontroversial di media masa untuk peningkatan sikap demokratis dan partisipasi belajar siswa perlu dikolaborasi dengan active learning.
3. Besaran prosentase pengembangan sikap demokratis dan partisipasi dalam pembelajaran PKn, yakni: Hasil rata-rata ujicoba ke 1 sampai ke 6 menunjukkan kemampuan menyampaikan pendapat secara kritis dan rasional (71,8%), kemampuan menanggapi permasalahan secara arif (73,6%), menyanggah secara santun dan bersahabat (74,6%). Tingkat partisipasi dalam pembelajaran sudah baik ditandai dengan kemampuan siswa

dalam partisipasi secara cerdas (78,8%), partisipasi secara bertanggung jawab (81,3%), dan partisipasi secara saling menghargai (84,5%).

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, Dasim & Suryadi, Karim. (2008). *PKN dan Masyarakat Multi-kultural*, Prodi PKn-Sekolah Pascasarjana–UPI Bandung: Bandung.
- Budi Winarno (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta. Media Press,
- Charles O Jones, (1970) *An Introduction to the Study of Public Policy*, Belmont, CA: adswort,
- Creswell, John W. (1994). *Qualitative & Quantitative Approach*. London New Delhi: SAGE Publications.
- Edi Suharto, (2005). *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta,
- Gall, Meredith D, Gall, Joyce P, & Borg, Walter R. (2003). *Educational Research, An Introduction* (Seventh Ed). Boston: Allyn and Bacon.
- Guba, e. G., & Lincoln, Y. S. 1981. *Effective Evaluation: Improving the Efectfulness of Evaluation Results Through Responsive and Naturalistic Approaches*, San Fransisco: Jossey-Bas Publishers.
- J.M. Mitchell dan W.C. Mitchel (1993), "Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar", *Jurnal Il Chaeles O Jones (1979) Pengantar Kebijakan Publik* (terjemahan) Jakarta: Bina Aksara mu Politik 3, Jakarta: Gramedia,
- James P. Lester dan Joseph Stewart (2000), *Public Policy: An Evolutionary Approach*, Australia: Wadsworth, *second edition*
- Joyce, B., Weill, M., Calhoun, E. 2000. *Model of Teaching*. London: Allyn and Bacon
- Miles, B., & Huberman, a. M. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Robert Eyeston, (1997) *the Treads of Policy: A study in leadership*" Indianapolis: Bobbs-Merril
- Samsuri. 2009. Objektivikasi Pancasila sebagai Modal Sosial Warga Negara Demokratis dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Acta Civicus*. Vol. 2 (2). Bandung: UPI
- Sapriya. 2008. Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa (Sebuah Kajian Konseptual – Filosofis dalam Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks Pendidikan IPS, *Jurnal Acta Civicus*. Vol. 1 (2). Bandung: UPI
- Silberman, Mel. 2001. *Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif*. Yogyakarta: Yappendis.
- Solichin Abdul Wahab, (2004). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Talbert, J.E. & McLaughlin, M.E. 1999. "Understanding Teaching in Context" dalam *Educational Leadership* Vol. 57 (3).
- Winataputra, U.S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi*, (Disertasi) Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (2006) *Konsep dan Strategi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah: Tinjauan Psiko-Pedagogis*, Jakarta: Panitia Semiloka Pembudayaan Nilai Pancasila, Dit. Dikdas, Ditjen Mandikdasmen (Makalah)
- Zaini, Hisyam, dkk. 2007. *Strategi Pembelajaran Aktif*. Yogyakarta: Center for Teaching and Staf Development, IAIN Sunan Kalijaga.
- _____ 2004. *Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Center for Teaching and Staf Development, IAIN Sunan Kalijaga.
- Zuriah, Nurul. (2010). "Model Pengembangan Pendidikan

Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal dalam Fenomena Sosial Pasca Reformasi di Perguruan Tinggi”. *Laporan penelitian Hibah Doktor – DP2M Dikti Diknas TA. 2010.*